

# FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG WAJIB PAJAK PRIBADI UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK

Amir Hidayatulloh

Universitas Ahmad Dahlan  
amir\_dayat@yahoo.com

## ABSTRACT

*The objective of this study is to determine the factors that encourage private taxpayers to tax fraud. These factors include attitude of non-compliance with tax, subjective norm, perceived behavioral control, and religiosity. Sampling this study using purposive sampling technique. The criteria used is taxpayer who has to have NPWP, thus totaling 52 sample analyzed samples. This study uses survey data collection technique whether made directly or through the internet. Hypothesis testing is done by multiple regression analysis. This study obtained results the intention to tax fraud is effect by subjective norm, and perceived behavioral control, but an attitude of non-compliance with tax and religiosity does nor effect the intention tax fraud.*

*Keywords: attitude of non-compliance with tax, subjective norm, perceived behavior control, religiosity, intention to tax fraud.*

---

## PENDAHULUAN

---

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Iqbal (2015) salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak bahwa sumber pendapatan negara sebesar 70% berasal dari pajak sehingga pajak berperan penting dalam suatu Negara. (pajak.go.id)

Peran pajak dalam penerimaan negara sangat besar, akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran untuk membayar/melaporkan pajak. Hal ini dapat dilihat dari kasus dua pengusaha asal Bandung yang menjadi tersangka dalam kasus perpajakan. Tersangka tersebut tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 12,4 Milyar. Tersangka tersebut merupakan wajib pajak dari perusahaan PT MPA. PT MPA merupakan

perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan, pengangkutan (transportasi), dan persewaan alat berat. Penggelapan pajak yang dilakukan dua tersangka tersebut meliputi tidak menyampaikan SPT tahunan PPh untuk WP badan, SPT masa PPhn serta melakukan pemungutan PPhn akan tetapi tidak menyetorkannya (pikiran-rakyat.com).

Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus jumlah pajak yang terutang, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran serta tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan (Permatasari dan Laksito (2013) dalam Wanarta dan Mangoting, 2014). Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak badan akan tetapi juga dilakukan oleh wajib pajak pribadi.

Beberapa penelitian sudah menemukan faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk

melakukan penggelapan pajak. Faktor-faktor tersebut meliputi sikap ketidakpatuhan pajak (Wanarta dan Mangoting, 2014), norma subjektif (Mustikasari, 2007), kontrol perilaku persepsian (Spicer dan Hero, 1985), dan religiusitas (Pope dan Mohdali, 2010). Namun, penelitian terdahulu kebanyakan mengambil sampel dalam satu KPP sehingga hasil yang didapat belum begitu dapat digeneralisasi. Hasil penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif. Hidayat dan Nugroho (2010) mengemukakan bahwa tidak selamanya sikap ketidakpatuhan dan kontrol perilaku persepsian akan mendorong individu untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut yaitu penelitian ini tidak menentukan satu kantor pratama pajak, akan tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada wajib pajaknya bukan kantor pratama pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai kantor pratama pajak, misal kantor pratama pajak yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah maupun kantor pratama pajak yang terletak di luar Jawa.

---

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

---

### Pajak

Pajak didefinisikan oleh Soemitro (1992) dalam Mardiasmo (2008:1) sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak mempunyai berfungsi sebagai *budgetair* dan *relegurend*. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* berarti pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan, pajak sebagai *fungsi relegurend* yaitu pajak digunakan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, misal, pajak yang tinggi dikenakan atas minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

### *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action*. *Theory of reasoned action* dikembangkan pada tahun 1980 oleh Ajzen. *Theory of reasoned action* lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku (Hartono, 2007:25).

Tahun 1988, Ajzen mengembangkan *theory of reasoned action* dengan menambah satu konstruk baru yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Teori yang dikembangkan dari *theory of reasoned action* dikenal dengan teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavior*). Oleh karena itu, dalam *theory of planned behavior* faktor yang akan mempengaruhi minat perilaku (*behavioral intention*) yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif (*theory of reaction action*), dan ditambah dengan kontrol perilaku persepsian (*theory of planned behavior*).

Hartono (2007:36) mendefinisikan sikap terhadap perilaku sebagai evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan (*affect*) positif atau negatif yang dialami/dirasakan individu saat melakukan perilaku tertentu. Oleh karena itu, ketika sikap dikaitkan dengan ketidakpatuhan pajak maka sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk bilamana wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi positif terhadap ketidakpatuhan pajak (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Oleh karena itu, individu akan melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dengan

mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaan orang lain disekitarnya (Ajzen dan Fishbein, 1980; Ajzen, 1991).

Lebih lanjut, Ajzen dan Fishbein (1980); Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subjektif terbentuk dari *normative belief*. *Normative belief* didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap harapan normatif individu lain yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak suatu perilaku tertentu, serta motivasi yang diberikan oleh individu yang direferensikan untuk berperilaku tertentu. Oleh karena itu, seseorang akan melakukan tindakan tersebut ketika individu yang dianggap penting baginya memerintahkan untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen dan Fishbein, 1980; Ajzen, 1991). Dalam wajib pajak orang yang dianggap penting antara lain yaitu wajib pajak lain, pemerintah, konsultan pajak dan sebagainya (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Perbedaan *theory of reasoned action* dengan *theory of planned behavior* yaitu salah satunya terletak pada asumsinya. *Theory of reasoned action* mempunyai asumsi bahwa manusia berperilaku secara sadar, atau dengan kata lain manusia dalam melakukan perilaku akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, serta manusia secara implisit maupun eksplisit juga akan mempertimbangkan dampak/konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya (Hartono, 2007: 31). Sedangkan, asumsi dari *theory of planned behavior* yaitu bahwa banyak perilaku yang secara penuh tidak dibawah kontrol individu sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) (Hartono, 2007: 63).

Kontrol perilaku persepsian mengarah pada kemudahan dan kesulitan yang dipersepsikan individu untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap halangan-halangan yang ada merupakan bentuk dari kontrol perilaku persepsian. Oleh karena itu, semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu

perilaku, serta semakin besar kontrol perilaku persepsian, semakin besar pula minat individu untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991; Hartono, 2007:65).

Minat perilaku dan perilaku bukanlah merupakan hal yang sama, atau dengan kata lain minat perilaku dan perilaku mempunyai makna yang berbeda. Minat perilaku masih merupakan suatu minat, yang mana minat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku, sedangkan perilaku merupakan tindakan nyata yang sudah dilakukan oleh suatu individu (Hartono, 2007: 26).

### **Pengembangan Hipotesis**

Faktor yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan suatu perilaku antara lain yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian, Ajzen (1991) menemukan bahwa sikap terhadap perilaku akan berpengaruh pada niat untuk melakukan perilaku. Sikap terhadap perilaku oleh Wanarta dan Mangoting (2014) dibawa dalam bidang kajian penggalapan pajak, dan sikap terhadap perilaku diturunkan menjadi sikap ketidakpatuhan terhadap pajak. Mutikasari, 2007 dan didukung oleh Wanarta dan Mangoting (2014) menemukan hasil bahwa sikap ketidakpatuhan terhadap pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap niat individu untuk melakukan penggelapan pajak

Norma subjektif merupakan salah satu faktor yang menentukan individu akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan. Oleh karena itu, seseorang akan berperilaku dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaan orang lain yang ada di sekitarnya (Ajzen dan Fishbein, 1980; Ajzen,

1991). Individu akan melakukan tindakan tertentu ketika tindakan tersebut dianggap penting oleh orang lain. Seseorang yang dianggap penting oleh wajib pajak meliputi wajib pajak lain, pemerintah, konsultan pajak, dan sebagainya (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Mustikasari (2007) mengemukakan bahwa pengaruh orang sekitar yang lebih kuat akan membentuk nilai *tax professional* untuk berperilaku patuh. Mustikasari (2007), lebih lanjut mengungkapkan bahwa jika *tax profesional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax profesional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang diwakili, serta ketika *tax profesional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah atau sebaliknya. Hasil ini didukung oleh Jackson dan Milliron (1986) yang menyatakan bahwa sikap ketidakpatuhan salah satunya disebabkan oleh rendahnya faktor deteksi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat individu untuk melakukan penggelapan pajak

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa kontrol perilaku persepsian mengarah pada kemudahan dan kesulitan yang dipersepsikan oleh individu untuk melakukan perilaku tertentu. Lebih lanjut Ajzen (1991) dan Hartono (2007:65) menyatakan pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap halangan-halangan yang ada merupakan refleksi dari kontrol perilaku persepsian.

Beberapa penelitian sudah menguji pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat individu untuk melakukan perilaku tertentu, misalnya yaitu Spicer dan Hero (1985); Mustikasari (2007); Hidayat dan Nugroho (2010); Wanarta dan Mangoting (2014), akan tetapi beberapa penelitian terdahulu masih

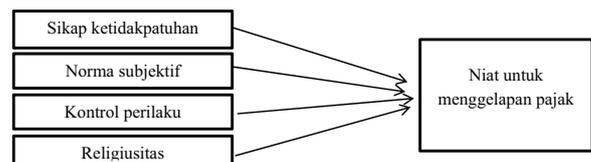
memperoleh hasil yang tidak konsisten. Spicer dan Hero (1985) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang sudah mengalami diperiksa masa lalu akan mempunyai kecenderungan lebih patuh dan mengurangi kecenderungan untuk menggelapkan pajak. Hasil Spicer dan Hero (1985) didukung oleh Mustikasari (2007); Ajzen (1991). Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak

Dister (1998) mendefinisikan religiusitas sebagai sikap keberagamaan yang mempunyai arti bahwa terjadi proses internalisasi agama kedalam diri individu. Sehingga, religiusitas merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku individu dalam kepatuhan pajak (Pope dan Mohdali, 2010). Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Religiusitas berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rerangka penelitian ini yaitu sebagai berikut.



**Gambar 1**  
**Rerangka Penelitian**

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak di Indonesia. Sampel didefinisikan oleh Indriantoro dan Supomo (2009:115) yaitu sebagian elemen-elemen dari populasi. Sampel dalam penelitian yaitu wajib pajak di Indonesia

yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan yaitu wajib pajak pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Pemilihan responden menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti (Hartono, 2013).

**Tabel 1**  
**Ringkasan Definisi Variabel dan Skala Pengukuran**

Variabel	Definisi	Referensi	Skala pengukuran	Referensi
Sikap ketidakpatuhan terhadap pajak	Sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk bilamana wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak	Wanarta dan Mangoting (2014)	Enam item pertanyaan, skala <i>likert</i> lima point	Benk <i>et al.</i> (2011)
Norma subjektif	Norma subjektif seseorang dalam menentukan apakah akan melakukan suatu tindakan tertentu atau tidak cenderung ditentukan oleh tekanan sosial	Fishbein dan Ajzen (1975); Ajzen (1991)	Dua item pertanyaan, skala <i>likert</i> lima point	Benk <i>et al.</i> (2011)
Kontrol perilaku persepsian	Kontrol perilaku persepsian direfleksikan dengan pengalaman masa lalu, danantisipasi pada halangan-halangan yang ada	Hartono (2007:65)	Empat item pertanyaan, skala <i>likert</i> lima point	Benk <i>et al.</i> (2011)
Religiusitas	Sikap keberagamaan yang mempunyai arti bahwa ada proses internalisasi agama kedalam diri individu	(Dister, 1998).	Lima item pertanyaan, skala <i>likert</i> lima point.	Pope dan Mondali (2010)
Niat untuk melakukan penggelapan pajak	Kecenderungan wajib pajak untuk tidak melaporkan/menyampaikan pajaknya	Wanarta dan Mangoting (2014)	Dua item pertanyaan, skala <i>likert</i> lima point	Mustikasari (2007)

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan menggunakan kuisisioner baik yang diberikan secara langsung maupun dikirimkan lewat komputer (*computer-delivery survey*). Alasan penggunaan teknik pengumpulan data survei dengan menggunakan kuisisioner yaitu karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan data opini individu.

Definisi variabel dan skala pengukuran disajikan pada tabel dibawah ini.

### Pengujian Hipotesis

*Pilot study* dilakukan dalam penelitian ini sebelum pengujian hipotesis dengan tujuan apakah kuisisioner berbahasa inggris dapat dipahami dengan mudah oleh responden setelah diterjemahan dalam Bahasa Indonesia. *Pilot study* dilakukan dengan memilih responden dalam jumlah kecil untuk menguji pemahaman dari kuisisioner (Hartono dan Abdillah, 2014). Sebelum melakukan uji hipotesis penelitian ini melakukan uji reliabilitas dan uji validitas, dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan regresi berganda. Berikut persamaan regresi antar variabel dalam penelitian ini.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan:

- Y: Niat untuk menggelapkan pajak
- a: Konstanta
- b<sub>1</sub>: Koefisien Regresi
- x<sub>1</sub>: Sikap ketidakpatuhan pajak
- x<sub>2</sub>: Norma subjektif
- x<sub>3</sub>: Kontrol perilaku persepsian
- x<sub>4</sub>: Religiusitas
- e: Error

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak di Indonesia, sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang disebar berjumlah 60 kuisisioner, sedangkan yang kembali berjumlah 56. Akan tetapi, empat kuisisioner dikeluarkan dari analisis karena responden tidak mengisi kuisisioner tersebut secara lengkap. Oleh karena itu, kuisisioner yang dianalisis berjumlah 52

kuesioner. Data mengenai responden disajikan pada tabel 2. Data responden meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan asal kantor pajak pratama (KPP).

**Tabel 2**  
**Data Responden**

Keterangan	Pengukur	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	29	55,77%
	Perempuan	23	44,23%
Usia	20-25	5	09,62%
	25-30	27	51,92%
	30-35	4	07,69%
	35-40	5	13,46%
	>40	9	17,31%
Tingkat Pendidikan	SMA	2	03,85%
	D3	9	17,31%
	S1	31	55,71%
	S2	11	21,15%
KPP	Profesi	1	01,92%
	DIY	31	59,61%
	Non-DIY	21	40,39%

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 2 menjelaskan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki (55,77%). Tingkat pendidikan responden didominasi oleh tingkat pendidikan strata 1 (55,71%). Penelitian ini didominasi oleh responden yang mempunyai kisaran usia 25 sampai dengan 30 tahun (51,92%). Responden penelitian ini juga didominasi oleh wajib pajak yang terdaftar di kantor pratama pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (59,61%).

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan pengujian hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas dijelaskan pada tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Uji validitas dan Reliabilitas**  
**Sikap Ketidapatuhan Pajak (SKP)**

	Sikap ketidapatuhan pajak (SKP) (Pearson Correlation)	Keterangan	Cronbachs alpha	Keterangan
SKP 1	0,648**	Valid	0,728	Reliabel
SKP2	0,528**	Valid		
SKP3	0,694**	Valid		
SKP4	0,787**	Valid		
SKP5	0,812**	Valid		
SKP6	0,379**	Valid		

Sumber: data diolah (2016), \*\* signifikasi pada 1%.

Tabel 3 menjelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk sikap ketidapatuhan pajak dalam kuesioner adalah valid. Hal ini terlihat dari korelasi masing-masing indikator (SKP1, SKP2, SKP3, SKP4, SKP5, dan SKP6) terhadap total skor konstruk SKP menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk mengukur konstruk sikap ketidapatuhan pajak berjumlah 6 item pertanyaan. Indikator dari konstruk sikap ketidapatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* (0,728) yang lebih besar dari 0,7.

**Tabel 4**  
**Uji validitas dan reliabilitas**  
**Norma subyektif (NS)**

	Norma Subyektif (NS) (Pearson Correlation)	Keterangan	Cronbachs alpha	Keterangan
NS1	0,938**	Valid	0,846	Reliabel
NS2	0,925**	Valid		

Sumber: data diolah (2016), \*\* signifikasi pada 1%.

Tabel 4 menjelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur

konstruk norma subyektif dalam kuesioner valid. Hal ini terlihat dari korelasi masing-masing indicator (NS1 dan NS2) terhadap total skor konstruk NS menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk mengukur konstruk norma subyektif berjumlah 2 item pertanyaan. Indikator dari konstruk norma subyektif yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbachs alpha* (0,846) yang lebih besar dari 0,7.

**Tabel 5**  
**Uji validitas dan reliabilitas**  
**Kontrol Perilaku Persepsian (KPP)**

	Kontrol Perilaku Persepsian (KPP) (Pearson Correlation)	Keterangan	Cronbachs alpha	Keterangan
KPP1	0,777**	Valid	0,725	Reliabel
KPP2	0,808**	Valid		
KPP3	0,699**	Valid		
KPP4	0,969**	Valid		

Sumber: data diolah (2016)

\*\* signifikasi pada 1%

Tabel 5 menjelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk kontrol perilaku persepsian dalam kuesioner valid. Hal ini terlihat dari korelasi masing-masing indicator (KPP1, KPP2, KPP3, dan KPP4) terhadap total skor konstruk KPP menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk mengukur konstruk kontrol perilaku persepsian berjumlah 4 item pertanyaan. Indikator dari konstruk kontrol perilaku persepsian yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbachs alpha* (0,734) yang lebih besar dari 0,7.

**Tabel 6**  
**Uji validitas dan reliabilitas**  
**Religiusitas (R)**

	Religiusitas (R) (Pearson Correlation)	Keterangan	Cronbachs alpha	Keterangan
R1	0,476**	Valid	0,771	Reliabel
R2	0,616**	Valid		
R3	0,768**	Valid		
R4	0,875**	Valid		
R5	0,771**	Valid		

Sumber: data diolah (2016)

\*\* signifikasi pada 1%

Tabel 6 menjelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk religiusitas dalam kuesioner valid. Hal ini terlihat dari korelasi masing-masing indikator (R1, R2, R3, R4, dan R5) terhadap total skor konstruk R menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk mengukur konstruk religiusitas berjumlah 5 item pertanyaan. Indikator dari konstruk religiusitas yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbachs alpha* (0,771) yang lebih besar dari 0,7.

**Tabel 7**  
**Uji Validitas dan Reliabilitas**  
**Niat Melakukan Penggelapan Pajak (NMP)**

	Niat Membayar Pajak (NMP) (Pearson Correlation)	Keterangan	Cronbachs alpha	Keterangan
NMP1	0,951**	Valid		Reliabel
NMP2	0,943**	Valid		

Sumber: data diolah (2016)

\*\* signifikasi pada 1%

Tabel 7 menjelaskan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk niat membayar pajak dalam kuesioner valid. Hal ini terlihat dari korelasi masing-masing indikator (NMP1 dan NMP2) terhadap total skor

konstruk NMP menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan untuk mengukur konstruk niat membayar pajak berjumlah 2 item pertanyaan. Indikator dari konstruk niat melakukan penggelapan pajak yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbachs alpha* (0,883) yang lebih besar dari 0,7.

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, serta uji heterokedastisitas.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria bahwa ketika nilai *signifkasi* > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal (Ghozali, 2011: 164). Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel 8.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**(One-Sample Kolmogrov-Sminornov Test)**

N		Unstandardized Residual
Normal Parameters	Mean	0,000000
	Std Deviation	1,07768498
Most Extreme Difference	Absolute	0,134
	Positive	0,134
	Negative	-0,59
Kolmogrov-Smirnov Z		0,966
Asymp. Sig (2-Tailed)		0,308

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 8 menjelaskan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *signifkasi* (0,308) > 0,05.

### 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Pendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas

di dalam model regresi dapat dilihat dari tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 serta tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih dari 10 (Ghozali, 2011:108). Hasil uji multikolonieritas disajikan dalam tabel 9

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF
Sikap Ketidapatuhan Pajak	0,824	1,214
Norma Subjektif	0,779	1,284
Kontrol Perilaku Persepsian	0,689	1,451
Religiusitas	0,906	1,104

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* variabel-variabel independen yang lebih besar dari 0,1 serta nilai VIF dari variabel-variabel independen yang lebih kecil dari 10.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji *gletser*, dengan kriteria bahwa ketika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:143). Hasil uji heterokedastisitas disajikan dalam tabel 10.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Heteroskedasitas**

Variabel Independen	Signifikasi
Sikap Ketidapatuhan Pajak	0,491
Norma Subjektif	0,366
Kontrol Perilaku Persepsian	0,063
Religiusitas	0,878

Sumber: data diolah (2016)

Tabel 10 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya yang diatas tingkat kepercayaan 5%. Oleh Karena itu, model regresi penelitian ini tidak mengandung adanya multikolonieritas.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*. *Goodness of fit* secara statistik dapat diukur dengan menggunakan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali, 2011:96).

### 1. Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisiensi determinasi (*R-square*) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu. Ketika suatu penelitian mempunyai nilai  $R^2$  kecil, hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya ketika nilai  $R^2$  mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

### 2. Uji Statistik F

Ghozali (2011: 98) mengemukakan bahwa tujuan dasar dari uji statistik F yaitu untuk menganalisis apakah semua variabel independen yang dimasukan ke dalam suatu model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima ketika nilai signifikansi  $< \alpha$  (5%), dan sebaliknya ketika nilai signifikansi  $> \alpha$  (5%) maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) tidak dapat diterima (Ghozali, 2011:101).

### 3. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen

secara parsial/individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik F dan uji statistik t pada dasarnya mempunyai kriteria pengambilan keputusan yang sama. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima ketika nilai signifikansi  $< \alpha$  (5%), dan sebaliknya ketika nilai signifikansi  $> \alpha$  (5%) maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) tidak dapat diterima (Ghozali, 2011:101). Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel 11.

**Tabel 11**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Signifikasi	Kesimpulan
Sikap Ketidakpatuhan Pajak	-0,438	-0,295	0,796	Tidak Terdukung
Norma Subjektif	-0,431	-2,890	0,006	Terdukung*
Kontrol Perilaku Persepsian	0,316	1,992	0,052	Terdukung**
Religiusitas	-0,083	-0,601	0,551	Tidak Terdukung
Konstanta= 2,994				
<i>Adjusted R</i> <sup>2</sup> = 0,116				
F Hitung= 2,666				
<i>Sign</i> =0,044				

Sumber: data diolah (2016), \* signifikan pada 5%; \*\* signifikan pada 10%

Tabel 11 menjelaskan bahwa besarnya *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 11,6%. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel dependen (niat untuk melakukan penggelapan pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan religiusitas) sebesar 11,6%, sedangkan sisanya (88,4%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam model regresi.

Uji statistik F menunjukkan bahwa variabel independen (sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan religiusitas) secara simultan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan

pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (0,044) yang lebih kecil dari 5%.

Uji statistik *t* menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak (hipotesis pertama tidak terdukung). Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (0,796) yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini didukung oleh Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyebutkan bahwa tidak selamanya sikap ketidakpatuhan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Oleh karena itu, individu yang mempunyai sikap ketidakpatuhan pada pajak mungkin tidak selamanya menimbulkan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini mungkin, ketika individu akan melakukan suatu perbuatan, individu akan mempertimbangkan dampak yang akan diterima baik dari sisi hukum maupun sosial.

Niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh norma subjektif, sehingga hipotesis kedua penelitian ini terdukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (0,006) yang lebih kecil dari 5%. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Wanarta dan Mangoting (2014) serta Mustikasari (2007). Oleh Karena itu, keterdukungannya hipotesis kedua ini dapat disimpulkan bahwa individu ketika akan melakukan penggelapan pajak akan mempertimbangkan keberadaan wajib pajak lain, pemerintah, maupun konsulat pajak.

Kontrol perilaku persepsian juga akan mempengaruhi niat individu untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga penelitian ini terdukung, walaupun pada signifikansi 10%. Hasil ini didukung oleh penelitian Spicer dan Hero (1985); Mustikasari (2007) serta Ajzen (1991).

Niat untuk melakukan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh religiusitas seseorang. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat tidak terdukung (signifikansi 0,551 > 5%). Welch *et al.* (2005) mengungkapkan masyarakat mempunyai persepsi yang sama mengenai penggelapan

pajak, terlepas dari tingkat religiusitasnya. Mc Kerchar *et al.* (2013) dan Utama dan Wahyudi, (2016) mengungkapkan bahwa belum ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa religiusitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi moral pajak. Bahkan lebih lanjut, Mc Kerchar *et al.* (2013) menyatakan bahwa integritas pribadi dianggap memiliki efek yang lebih kuat pada sikap kepatuhan pajak dibandingkan dengan keyakinan agama.

---

## KESIMPULAN DAN SARAN

---

Penelitian ini memberikan bukti bahwa norma subjektif (tekanan sosial), pengalaman masa lalu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan suatu aktivitas. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa tidak selamanya sikap ketidakpatuhan akan menimbulkan niat ketidakpatuhan, serta persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak sama, terlepas dari tingkat religiusitasnya.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu (1) penelitian ini menggunakan metode *survey*, sehingga keterbatasan penelitian ini seperti keterbatasan dari metode *survey*, yaitu validitas internal rendah (2) sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil. Hal ini disebabkan karena berberapa responden yang ditemui enggan melakukan pengisian kuisioner. Oleh Karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, dan (3) penelitian ini menghasilkan *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 11,6%, sehingga variabel independen (sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan religiusitas) hanya dapat menjelaskan (11,6%) variabel dependen (niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak). Oleh Karena itu, 88,4% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Oleh Karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti motivasi dan kewajiban moral.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Ajzen, I, and Fishbein, M. 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Ajzen, I. 1988. *Attitude, Personality, and Behavior*. Chicago: Dorsey Press.
- . 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Process*.
- Benk S., Cakmank AF., dan Budak T. 2011. An Investigation of Tax Compliance Intention. A Theory of Planned behavior Approach. *European Journal of Economics*.
- Dister, N.S. 1998. *Psikologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fishbein, dan I Ajzen. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley: Reading MA.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hartono, Jogyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi
- . 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 6. Yogyakarta: BPFE UGM
- , dan W. Abdillah. 2014. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE UGM
- Hidayat, Widi dan Nugroho A.A. 2010. Studi Empiris Theory of Planned behavior dan Pengaruh Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 12, No 2: 82-93
- <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> dilihat tanggal 30 September 2015, Pukul 09:09.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya-dua-pengusaha-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-pajak> dilihat tanggal 30 September 2015, Pukul 09:34.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jackson, B.R, dan Milliron, V.C. 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects. *Journal of Accounting Literature*.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2008). Yogyakarta: ANDI
- McKerchar, M., Bloommquist, K., dan Pope, J. 2013. Indicators of Tax Morale: An Exploratory Study. *Ejournal of Tax Research*, Vol 11, No1: 5-22
- Mustikasari E. 2007. Kajian Empiris Tentang Keptuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan-Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Pope J dan Mohdali R. 2010. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum*, Vol 25, No 3: 562-592

- Spicer, Michael W, and Hero, Rodney E. 1985. Tax Evasion and Heuristics: A research Note. *Journal of Public Economics* Vol 26, No 2: 263-267.
- Utama, Andhika dan Dudi Wahyudi. 2016. Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Vol 3, No. 2: 1-13
- Wanarta, Feby Eileen, dan Yenny Mangoting. 2014. Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 1: 1-13
- Welch, M.R., XU,Y., Bjarnason, T., Petee, T., O'Donell, P., dan Magro, P. 2005. But Everbody Does It: The Effect of Perception, Moral Pressures, and Informal Sanction on Tax Chetaing. *Sociological Spectrum*, Vol 25, No.1: 21-52